

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA SENGAJA  
DAN TANPA HAK DALAM HAL PATEN-PRODUK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2016 TENTANG PATEN<sup>1</sup>  
Oleh: Fariska Erlinda Djaman<sup>2</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>  
Yumi Simbala<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana tindak pidana sengaja dan tanpa hak dalam hal Paten Produk menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan bagaimana mekanisme memperoleh Hak Paten dan Perlindungan Hukum terhadap Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan; 1. Dirumuskan dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa setiap orang tanpa persetujuan Pemegang paten dilarang membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten dan dalam hal Paten proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana huruf a dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 2. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan Perlindungan hukum atas Paten dalam undang-undang tidak hanya bersifat administratif dan privat saja, melainkan juga memuat hukum pidana materiil dan hukum formil di bidang paten .

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pidana Sengaja Dan Tanpa Hak, Paten Produk, UU 13 Tahun 2016

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Intellectual Property Rights* acapkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual disingkat HAKI. Diantara dua istilah tersebut, istilah kedua yang digunakan dalam perundang-undangan kita. Diantara dua istilah tersebut menurut Rachmadi Usman<sup>5</sup>, khususnya antara kata “milik” dan kata “kekayaan” lebih tepat istilah milik atau kepemilikan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut system hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.

Istilah Paten yang digunakan sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *oktrooi* ini berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare*. Dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum di Indonesia, istilah Paten lebih membumi. Istilah Paten di Indonesia sering salah kaprah digunakan di tengah masyarakat. Di pinggir jalan, kadang dijumpai kata dukun/pengobatan alternatif paten atau *paten online* yang merujuk pada sistem layanan Kepolisian. Hal-hal demikian mengganggu pembangunan kesadaran ber-HKI masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Perlu pembangunan membudayakan paten atau berkesadaran untuk melahirkan invensi.<sup>6</sup>

Pengertian Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 angka 1 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten.

Pemberian paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 18071101264

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, hal 1.

<sup>6</sup> Endang Purwaningsih, 2020, *Paten Dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, Jatim, hal 12.

dilindungi. Apabila tidak ada perlindungan yang memadai, mungkin lebih baik memadai inventor menyimpan teknologinya. Sebaliknya dengan pemberian paten, negara meminta inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam spesifikasi paten yang deskripsinya di akses secara luas, sehingga masyarakat bisa belajar dari invensi itu dan diharapkan masyarakat akan menghasilkan invensi lain yang lebih maju dari pada invensi yang sedang dimintakan paten tersebut.

Perlindungan paten diberikan untuk elemen yang bersifat immaterial yang didefinisikan melalui kriteria hukum dan hak eksklusif yang mencakup isi yang bersifat immaterial. Misalnya informasi yang kemudian digabungkan dengan objek material untuk dikomersialisasikan. Tujuan fundamental dari sistem paten untuk mendukung pengembangan teknologi adalah untuk kemanfaatan masyarakat luas. Isu sentral dalam hal ini adalah bagaimana dan maksud apa keseimbangan antara inventor dan pihak ketiga dapat dipelihara. Di satu sisi kita harus memberikan incentive yang terkait dengan penghargaan secara ekonomi dan pemberian hak eksklusif paten. Di sisi lain dapat dijaga agar akibat dari sistem *blocking* paten sebagai penghargaan atas kontribusinya pada masyarakat.<sup>7</sup>

Pembentukan hak paten oleh pihak penguasa, berdasarkan undang-undang yang berlaku mempunyai sifat kuat sekali karena diberikan oleh pemerintah. Si pemegang hak paten mendapat hak mutlak atas pendapatan yang berwujud benda yang telah dipatenkan. Hak paten seperti halnya hak merek dan hak pengarang merupakan hak mutlak, yang bukan hak kebendaan, namun dapat berlaku terhadap setiap orang lain. Si pemegang hak paten atas pendapatannya telah mempunyai suatu hak monopoli, Artinya, dia dapat menggunakan haknya untuk melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat apa yang telah di patenkannya. Dengan demikian, dia mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak saingannya.

Bahkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan. Si pelanggar dapat dituntut

melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih penting baginya ialah tuntutan penggantian kerugian terhadap si pelanggar, sebab tuntutan tersebut terkadang di dalam praktik merupakan jumlah uang yang besar. Hak Paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Pasal 570 KUHPerdara., oleh sebab itu merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya. Hak tersebut menurut ketentuan undang-undang termasuk benda bergerak, namun seiring oleh undang-undang diperlakukan sebagai benda tidak bergerak.

Hak paten merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh yang dapat dipindahtangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan dan sebagainya, asal penyerahan tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada Daftar Paten, maksudnya agar dapat diketahui oleh umum, juga hak mana dapat digadaikan kepada pihak ketiga. atau pihak lain dengan cara yang sama seperti tersebut diatas. Di dalam dunia perdagangan, karena sifat hak paten merupakan kekayaan maka sering terjadi atas pertimbangan komersial si pemegang akan memanfaatkan haknya itu agar bisa mendatangkan keuntungan baginya.

Setiap tindak pidana dibentuk oleh pembentuk undang-undang, ada suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga dalam hal pembentuk Undang-Undang HAKI merumuskan tindak pidana dalam setiap undang-undang HAKI. Ada tujuan undang-undang positif mengenai HAKI. Di dalam setiap undang-undang HAKI tersebut terdapat bentuk-bentuk tindak pidana HAKI masing-masing. Artinya hukum pidana diberi peran yang besar dalam hal perlindungan hukum terhadap bermacam-macam hak dalam HAKI. Singkatnya, perlindungan hukum terhadap HAKI adalah perlindungan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan HAKI dari penyerangan terhadap hak tersebut oleh orang atau pihak yang lain yang tidak berhak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tindak pidana sengaja dan tanpa hak dalam hal Paten Produk menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016?
2. Bagaimana mekanisme memperoleh Hak Paten dan Perlindungan Hukum terhadap Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016?

---

<sup>7</sup> Rahmi JP Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 149.

### C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan, metode yuridis normatif yaitu penulisan berdasarkan kepustakaan hukum melalui pengelolaan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primair yang mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, buku-buku literatur yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta KUHAP. Bahan hukum sekunder yaitu, hasil penelitian, jurnal hukum dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, ensiklopedia, majalah hukum, artikel dan lain-lain yang sangat menunjang penelitian ini. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

Selanjutnya dalam menganalisa data sekunder berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekundair dan tersier yang ada berkaitan dengan pengaturan hukum Hak Paten. Dan analisis yuridis normatif terhadap bahan hukum yang ada diuraikan secara deduktif dan induktif atau sebaliknya induktif ke deduktif yaitu melalui gambaran yang umum untuk disimpulkan ke hal-hal yang khusus atau sebaliknya secara bergantian.

### PEMBAHASAN

#### A. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Dalam Hal Paten-Produk

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merumuskan sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Sementara Pasal 160 yang ditunjuk oleh Pasal 161 merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang tanpa persetujuan Pemegang paten dilarang: dalam hal Paten – produk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau

- a. dalam hal Paten – proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf a.

Dalam ketentuan Pasal 160 terkandung perlindungan hukum pemegang Paten dan/atau Paten-proses secara administratif dan keperdataan. Namun pelanggaran terhadap norma Pasal 160 dalam pasal itu tidak disebutkan sanksi administratif atau sanksi perdata. Melainkan oleh Pasal 161 diberikan sanksi pidana, sehingga menjadi tindak pidana. Ciri umum suatu tindak pidana dalam undang-undang, adalah disebutkan ancaman pidananya baik dalam pasal yang sama, maupun dalam pasal lain yang berhubungan. Oleh sebab itu norma Pasal 160 tidak bisa berdiri sendiri, dan tidak mempunyai arti apa-apa dari sudut hukum pidana, jika tidak dihubungkan dengan Pasal 161. Pasal 160 sekedar merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana yang dirumuskan Pasal 161 juga dalam Pasal 162.

Bila tindak pidana Pasal 161 dirumuskan secara lengkap dalam satu naskah dengan menghubungkannya dengan rumusan Pasal 160, maka selengkapnya sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan atau
- b. dalam hal Paten-proses; menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana huruf a; dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana dirumuskan Pasal 160 jo Pasal 161 ini serupa dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 130 jo Pasal 16 Undang-Undang Paten sebelumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, meskipun cara merumuskan tindak pidana Pasal 161 hanya menyebutkan kata "Paten" saja, tanpa menyebut tentang paten proses. Harus diartikan kata "Paten" dalam rumusan Pasal 161 tersebut sebagai Paten – produk dan Paten-prose, sesuai dengan rumusan Pasal 160 huruf a dan huruf b.

Cara penafsiran ini disebut dengan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), menafsirkan ketentuan dengan menghubungkannya dengan rumusan/ketentuan yang lain yang *in casu* berdasarkan ketentuan yang dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup>

Pengancaman pidana dalam tindak pidana Paten ini menggunakan sistem imperatif dan alternatif kumulatif. Imperatif artinya jika terbukti tindak pidana dan pembuatnya bersalah, maka harus dijatuhkan pidana yang sifatnya alternatif dan/atau kumulatif (bersama), karena menggunakan frasa “dan/atau”.

Meskipun pembuat tindak pidana Paten ini dipidana dengan pidana penjara dan/atau sekaligus dengan pidana, korban tidak kehilangan haknya untuk menuntut kerugian keperdataannya akibat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Meskipun telah dipidana denda, kerugian perdata korban tetap dapat dituntut baik diajukannya penggabungan gugatan perdata ke dalam perkara pidana ketika proses penuntutan di peradilan pidana,<sup>9</sup> maupun diajukan tersendiri ke Pengadilan Niaga,<sup>10</sup> dan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>11</sup> Pidana denda tidak ada hubungannya dengan sejumlah/nilai rupiah dari denda yang masuk ke kas Negara. Kerugian akibat tindak pidana khusus bagi korban yang dapat dituntut nilai kerugiannya (materiil maupun idiil) kepada pembuat.

Bahwa dalam setiap tindak pidana selalu terdapat perbuatan melawan hukum,<sup>12</sup> meskipun dalam hal tindak pidana tanpa korban. Tindak pidana tanpa korban yang tidak menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain. Namun ada kerugian immaterial berupa terganggunya/dirusaknya nilai-nilai keadilan atau perasaan keadilan hukum masyarakat. Kalau dilihat dari sudut objek tindak pidananya, Pasal 161 jo Pasal 160 ada dua macam tindak pidana Paten sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 160, ialah terhadap objek Paten produk (huruf a) dan terhadap objek Paten-proses (huruf b), terhadap 2 (dua) objek tersebut, jelas terlihat

bahwa perbuatan yang dilarang terhadap dua objek tindak pidananya berbeda.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a terdiri dari unsur-unsur berikut:

Unsur subjektif

1) Kesalahan: dengan sengaja

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana *dolus*. Secara tegas dicantumkan unsur kesalahan bentuk kesengajaan (*opzettelijk*). Dalam hal dicantumkan unsur sengaja seperti ini ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama tentang arti “sengaja”, dan kedua tentang “kemana unsur sengaja itu ditujukan” atau diarahkan.

Pertama, dari keterangan *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda, dapat disimpulkan bahwa arti sengaja ialah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*).<sup>13</sup>

Kedua, mengenai kemana sengaja harus diarahkan, melihat pada system WvS Belanda, yang oleh Moeljatno dikatakan kunci minister Modderman.<sup>14</sup> Maksudnya, apabila unsur sengaja dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka sengaja selalu ditujukan pada unsur-unsur lainnya yang ditempatkan di urutan dimuka kata sengaja.

Berdasarkan dua hal tersebut, maka dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana Pasal 161 *juncto* Pasal 160 huruf a, mengandung arti, bahwa pembuat menghendaki melakukan perbuatan membuat, menggunakan dan sebagainya; dan ia mengerti bahwa perbuatannya melanggar hak Paten-produk milik/hak orang lain. Demikianlah sengaja dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya. Pengertian sengaja dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya itu harus dibuktikan. Dibahas/diulas dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Pembuktian yang demikian sangat masuk akal.

Masalah lain, dalam doktrin hukum pidana dikenal ada tiga bentuk kesengajaan (*opzettelijk*). Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) disebut juga

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 35.

<sup>9</sup> Pasal 98 – 101 KUHAP.

<sup>10</sup> Pasal 142-143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>11</sup> Pasal 1365 jo 1370 jo 1371 KUHPerdata

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2016, *Malpraktik Kedokteran*, Sinargrafika, Jakarta, hal 47. Hal 47

<sup>13</sup> Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hal 17

<sup>14</sup> Moeljatno, 1984, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)* Bina Aksara, Jakarta, hal 14

*dolus eventualis*.<sup>15</sup> Apakah tiga bentuk kesengajaan dalam doktrin seperti itu perlu diperhatikan dan dapat diterapkan pada perkara-perkara pidana, seperti pada Pasal 162 jo Pasal 160.

Mengenai kesengajaan sebagai maksud tidaklah ada persoalan, Sebab arti kesengajaan sebagai maksud mendapat wadah yang jelas dalam pengertian sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui. Maksud tidaklah berbeda dengan kehendak. Demikian juga orang yang menghendaki sesuatu, orang itu harus mengetahui terlebih dahulu tentang sesuatu tersebut, tidaklah mungkin menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya. Disini pengetahuan adalah syarat menghendaki.

Agak berbeda dengan kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. Menurut sifatnya dua bentuk kesengajaan ini dapat diterapkan dengan baik tindak pidana materiil. Tindak pidana yang akibat perbuatan menjadi syarat satu-satunya untuk menyelesaikan tindak pidana. Tanpa timbulnya akibat, tindak pidana tidak terjadi secara sempurna. Untuk menentukan adanya kesengajaan sebagai kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan. Apakah orang mampu menilai kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan. Akal ini harus diukur dari akal orang yang normal pada umumnya, tidak perlu akal seorang yang genius.

Untuk tindak pidana formil, sukar untuk mengaitkan kesengajaan sebagai kemungkinan yang ditujukan pada semata-mata melakukan perbuatan, Sesungguhnya praktik untuk menerapkan kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian baru dianggap perlu, dalam dua hal saja, yaitu:<sup>16</sup>

- Pertama, apabila kesengajaan sebagai maksud sukar dibuktikan, padahal sangat perlu. Apabila kesengajaan sebagai maksud yang intinya menghendaki dan mengetahui terang benderang keberadaannya, tidaklah perlu bersusah payah Jaksa penuntut umum membuktikan adanya kesengajaan

sebagai kepastian atau kemungkinan. Tiga bentuk kesengajaan yang ada dalam doktrin, hanya satu bentuk kesengajaan saja yang dapat ditujukan pada satu akibat. Tidak mungkin dalam satu kasus terdapat ketiga-tiga bentuk sengaja yang ditujukan pada satu akibat. Jika terdapat kesengajaan sebagai kepastian yang ditujukan pada suatu akibat, tidak mungkin terdapat sekaligus kesengajaan sebagai kemungkinan yang ditujukan pada akibat yang sama.

- Kedua, dalam hal membuktikan hubungan antara pengetahuan (sengaja dalam arti mengetahui/*wetens*) dengan salah satu unsur tindak pidana, yang menurut letak dan sifatnya dalam rumusan perlu dibuktikan. Contoh konkret, tindak pidana Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a, disini Jaksa penuntut umum perlu membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa produk yang diberi Paten yang dijual atau disewakannya (objek tindak pidana) adalah Paten-produk terdaftar milik orang lain.

Keadaan ini perlu dibuktikan, sebab unsur dengan sengaja diletakkan mendahului unsur tanpa hak. Sementara tanpa hak atau melawan hukum tersebut dibuktikan melalui fakta bahwa Paten-produk tersebut telah terdaftar milik pihak lain dan dibuktikan bersertifikat. Jika Jaksa penuntut umum mendapat kesukaran untuk membuktikan keadaan ini, barulah perlu membuktikan sengaja sebagai kemungkinan. Dalam hal demikian, fakta-fakta objektif sekitar terdakwa, perbuatan maupun objek perbuatan perlu dikemukakan, dianalisis sedemikian rupa dalam *requisitoir* dalam rangka untuk menarik kesimpulan tentang adanya kesengajaan sebagai kemungkinan.

Artinya kemungkinan terdakwa mengerti tentang keadaan Paten-produk tersebut terdaftar milik orang lain, namun pembuktian seperti ini perlu berhati-hati, karena sangat tipis batas antara tidak mengetahui dan kemungkinan mengetahui.<sup>17</sup>

- 2) Melawan hukum: tanpa hak

Frasa “tanpa hak” dalam anak kalimat “tanpa hak melakukan perbuatan..” adalah merupakan unsur melawan hukum. Sifat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 174.

<sup>16</sup> H.Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, hal 88

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 89

melawan hukumnya perbuatan terletak pada dua hal:<sup>18</sup>

- Pertama, bahwa Paten bukan miliknya tetapi milik orang lain. Jaksa harus membuktikan bahwa suatu produk yang diberi Paten yang dijual terdakwa atau digunakan dan lain-lain adalah bukan haknya, tetapi hak orang lain. Orang lain yang berhak perlu dibuktikan. Cara membuktikannya, ialah Paten tersebut telah terdaftar dengan bersertifikat atas nama orang lain, demikian juga perlu dibuktikan bahwa Paten tersebut masih berlaku.
- Kedua, perbuatan seperti membuat, menggunakan, menjual produk yang diberi Paten "tanpa persetujuan" pemegang Paten. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif, karena tanpa izin maka hak eksklusif itu dilanggar. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten

### 3) Perbuatan dalam hal paten-produk

Ada 9 (Sembilan) bentuk perbuatan yang dilarang yang sifatnya alternatif. Cukup terbukti salah satu diantara Sembilan perbuatan. Sebagian dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan dalam perjanjian. misalnya menjual, mengimpor, menyewakan dan lain-lain. Walaupun perjanjian-perjanjian dibuat dengan melawan hukum yang berakibat tidak sahnyanya perjanjian, namun dalam hal menerapkan ketentuan tindak pidana, tidak sahnyanya perjanjian tidak perlu dipersoalkan. Dengan telah terpenuhinya semua unsur, maka tindak pidana ini sudah terjadi, sementara pihak lain yang beritikad baik haknya wajib dilindungi.

Ditinjau dari hukum perdata, si pembuat tindak pidana adalah pelaku perbuatan melawan hukum yang dibebani kewajiban hukum penggantian kerugian terhadap si pembeli yang beritikad baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata, tetapi bagi pembeli yang beritikad buruk dapat ditarik ke dalam perkara pidana dengan didakwa penadahan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 480 KUHPidana.

Perbuatan membuat produk yang diberi Paten, artinya pembuat mengadakan suatu produk Paten yang menjadi hak orang lain. Perbuatan membuat adalah segala macam dan wujud perbuatan mengadakan atau membuat menjadi ada suatu benda yang sebelumnya tidak ada. Perbuatan menggunakan produk Paten artinya memanfaatkan kegunaan atau fungsi dari suatu benda yang *in casu* produk Paten hak orang lain.

Perbuatan menjual merupakan perbuatan dalam perjanjian jual beli, adalah perbuatan yang dilakukan penjual dengan menyerahkan benda atau hak benda yang karena itu ia menerima sejumlah uang tertentu dari tangan pembeli sebagai harga barang yang dibeli.

Mengimpor adalah perbuatan memasukan benda *in casu* produk Paten hak orang lain dari luar wilayah territorial Indonesia ke wilayah hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 (LN.1960 Nomor 22) wilayah territorial hukum Indonesia adalah 12 mil laut diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia. Kemudian dikukuhkan ke dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1973. Dalam hal berlakunya hukum pidana Indonesia, wilayah berlakunya hukum Indonesia tersebut diperluas oleh Pasal 3 KUHP, yakni dalam kendaraan air Indonesia dan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 termasuk di dalam pesawat udara Indonesia.

Menyewakan adalah perbuatan menyerahkan kemanfaatan atau kegunaan suatu benda *in casu* produk yang diberi Paten bukan haknya pada orang lain dengan pembayaran uang sejumlah tertentu sebagai harga sewa. Di dalam perbuatan menyewakan bisa juga terdapat perbuatan

---

<sup>18</sup> Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

menyerahkan, ialah perbuatan mengalihkan kekuasaan benda ke dalam kekuasaan orang lain *in casu* Penyewa. Selesainya perbuatan menyerahkan, apabila kekuasaan atas benda itu telah beralih sepenuhnya pada orang yang menerima. Sebagai tanda beralih kekuasaan benda adalah orang yang menerima telah dapat melakukan segala perbuatan terhadap benda itu secara langsung dan tanpa harus melalui perbuatan yang lain lebih dulu.

Tiga perbuatan lainnya, ialah menyediakan untuk dijual; menyediakan untuk disewakan, dan menyediakan untuk diserahkan. Menyediakan adalah menempatkan benda dalam jumlah tertentu dalam kekuasaannya *in casu* produk yang diberi Paten hak orang yang maksudnya untuk dijual atau disewakan atau diserahkan. Jika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera dilakukan, yakni dijual atau disewakan atau diserahkan pada pihak lain.

#### 4) Objek Paten – Produk

Paten – produk, adalah produk suatu barang tertentu yang diberi hak paten. Objek tindak pidana Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a ini ialah barang yang dihasilkan yang diberi hak Paten. Perlindungan hukumnya adalah hak patennya yang sudah barang tentu sekaligus barang yang dihasilkan/diproduksi.

Objek tindak pidana disebutkan Paten-produk, dan dengan demikian termasuk produk yang dihasilkan. Produk yang diberi Paten adalah produk yang dikeluarkan Pemegang Paten, baik pemegang paten adalah Inventor maupun pihak yang menerima hak dari Inventor. Contoh A adalah Inventor sebagai Pemegang Paten atas pembuatan kompor biji arak, yang oleh Negara telah diberi hak Paten-produk dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Paten. B membuat kompor yang sama tanpa izin dari Pemegang Paten-produk semula. Objek tindak pidana berkaitan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, yaitu Hak Paten atas pembuatan kompor biji jarak tersebut.

Apabila tindak pidana yang Pasal 161 dihubungkan dengan Pasal 160 huruf b dirumuskan dalam satu naskah, maka tindak pidana tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dalam hal Paten-proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang, atau tindakan

lainnya sebagaimana dimaksud huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Apabila dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1. Kesalahan dengan sengaja

Unsur kesalahan merupakan kesengajaan, sama dengan kesalahan dalam tindak pidana Paten-produk yang telah dibahas sebelumnya. Sengaja dalam rumusan tindak pidana Paten yang kedua, mengandung pengertian:

- a. Kehendak dalam arti sempit, pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan menggunakan proses produksi yang diberi Paten atau dalam arti luas menghendaki untuk melakukan tindak pidana menggunakan proses produksi yang diberi Paten yang diketahuinya milik/hak orang lain. Kehendak dalam pengertian luas sudah tercakup di dalamnya suatu pengetahuan, sebab setiap timbulnya suatu kehendak selalu didahului pengetahuan tentang sesuatu yang dikehendaki tersebut. Tidaklah mungkin orang menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya. Pengetahuan adalah syarat timbulnya kehendak.
- b. Diketahuinya apa yang digunakan adalah proses produksi untuk membuat suatu barang hak orang lain.
- c. Diketahuinya proses produksi pembuatan barang yang telah diberi Paten milik orang lain.
- d. Diketahuinya juga bahwa menggunakan proses produksi tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Artinya juga pembuat menyadari bahwa proses produksi pembuatan barang tersebut telah diberi Paten, dan menyadari bahwa perbuatan itu dilakukannya tanpa hak (melawan hukum)

#### 2. Melawan hukum: tanpa hak

Sifat melawan hukum menurut Pasal 161 dicantumkan dengan menggunakan frasa “tanpa hak”. Tindak pidana yang sama

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 94

dalam Pasal 16 ayat 1 undang-undang Paten yang lama (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001) disebutkan dengan frasa “tanpa persetujuannya”. Perbedaan itu tidak menimbulkan masalah. Dalam doktrin, dua istilah tersebut menggambarkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Tanpa persetujuan merupakan isi atau penyebab seseorang tidak berhak melakukan perbuatan. Suatu istilah lain dari unsur melawan hukumnya perbuatan.

Letak sifat melawan hukum perbuatan tanpa hak di Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a maupun huruf b bersifat objektif. Disebut sifat melawan hukum objektif, namun demikian apabila dilihat dari sudut ditempatkan kata sengaja sebelum frasa tanpa hak (melawan hukum) dalam kalimat rumusan, maka sengaja dalam arti pengetahuan perlu juga ditujukan/diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan. Artinya, sebelum melakukan perbuatan menggunakan proses produksi, pembuat menyadari tanpa hak atau tanpa persetujuan Pemegang Paten. Pembuat menyadari perbuatan semacam itu dilarang. Dilarang sama arti dengan mengandung sifat melawan hukum.

Unsur melawan hukumnya perbuatan dalam Pasal 161 jo Pasal 160 ini selain bersifat objektif, juga bersifat subjektif. Dalam persidangan harus dibuktikan kedua-dua sifat itu, objektif dan subjektif. Tanpa terbukti salah satu sifat dari melawan hukum tersebut, terdakwa tidak boleh dipidana, dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, tergantung dari dasar pertimbangan hukumnya.

Jika didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa perbuatannya terbukti namun tidak ada unsur kesalahan yang *in casu* tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa Paten produk atau Paten-proses milik orang lain yang sah, maka terhadap terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Jika didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa unsur tanpa hak (melawan hukumnya) dalam hubungannya dengan unsur sengaja tidak

terbukti, maka terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*).<sup>20</sup> Kedua-dua pertimbangan hukum tersebut beralasan dan dapat dibenarkan.

Sifat melawan hukum perbuatan menggunakan proses produksi untuk membuat barang yang diberi Paten sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 161 juncto Pasal 160 huruf b, juga terletak pada 2 (dua) keadaan objektif. Sama halnya dengan sifat melawan hukum pada tindak pidana Paten pada Pasal 161 juncto Pasal 160 huruf a. Sifat objektif melawan hukumnya perbuatan menggunakan proses produksi milik hak Paten orang lain, terletak pada:<sup>21</sup>

- Pertama, bahwa proses produksi yang diberi Paten adalah hak orang lain. Untuk membuktikannya, adalah bahwa proses produksi tersebut terdaftar atas nama orang lain dan masih berlaku. Dibuktikan dengan Sertifikat Paten-proses.
- Kedua pembuat tidak mendapat izin dari Pemegang Paten.

Sementara sifat subjektifnya, bahwa si pembuat menyadari atau mengetahui bahwa proses produksi yang dia gunakan untuk menghasilkan suatu barang atau produk adalah milik orang lain, bukan hak miliknya.

Objek tindak pidana Paten menurut Pasal 161 jo Pasal 160 huruf b adalah bukan produk yang diberi Paten, melainkan proses pembuatan barang atau proses produknya. Sementara itu perbuatan yang dilarang adalah menggunakan proses produksi untuk membuat barang yang diberi Paten hak orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur perbuatan yang dilarang, yaitu menggunakan proses produksi yang diberi Paten milik orang lain untuk membuat barang.

Menggunakan dalam pengertian tindak pidana menurut pasal ini adalah membuat barang melalui suatu proses yang proses mana sudah mendapat Paten hak orang lain. Dengan kata lain menggunakan proses pembuatan barang dengan meniru proses pembuatan barang yang sudah dipatenkan sebelumnya.

Kalimat “dan tindakan lainnya” sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b “pada rumusan Pasal 160 huruf b, dimaksudkan adalah

---

<sup>20</sup> Pasal 191 KUHP.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 97



terhadap semua perbuatan yang disebutkan pada huruf a. Perbuatan itu adalah: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan, namun objek perbuatannya yang berbeda.

Objek Sembilan perbuatan dalam tindak pidana Pasal 160 huruf a ditujukan pada produk yang diberi Paten. Sementara Sembilan perbuatan menurut huruf b ditujukan pada proses produksi yang diberi Paten. Dalam hal ini objek perbuatan menyatu dengan objek tindak pidana. Dua objek, yang satu pada huruf a dalam hal Paten-produk berupa produk yang diberi Paten. Sementara yang kedua, pada huruf b dalam hal Paten-proses berupa proses produksi yang diberi Paten. Keduanya merupakan objek perbuatan yang sekaligus merupakan objek tindak pidana.

Diantara perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Paten Pasal 161 jo Pasal 160, terhadap satu perbuatan saja, ialah "mengimpor" produk farmasi yang telah diberi Paten tidak dipidana dengan syarat:

1. Bahwa produk farmasi tersebut dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dipasarkan di suatu Negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bahwa produksi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.<sup>22</sup>

Ketentuan Pasal 167 ini merupakan pengecualian dari Pasal 161 jo Pasal 160. Syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal itu sesungguhnya merupakan alasan hapusnya sifat melawan hukum dari tindak pidana Paten-produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 jo Pasal 160. Jika syarat-syarat itu dipenuhi, maka perbuatan mengimpor suatu produk farmasi, kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan dan merupakan alasan peniadaan pidana khusus merupakan alasan pembenar umum menurut Bab III Buku I KUHP. Oleh karena hapus sifat

melawan hukumnya perbuatan, maka dalam melakukan perbuatan mengimpor produk farmasi yang dilindungi yang dipegang pihak lain, tidak boleh dipidana. Alasannya, bahwa setiap tindak pidana mengandung unsur sifat melawan hukum. Jika sifat melawan hukum perbuatan lenyap, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan hukum, pembuatnya tidak dapat dijatuhi pidana.

Menurut Penjelasan Pasal 167 huruf b, disebutkan bahwa: "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam pasal ini adalah proses untuk mengurus izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait.

## **B. Mekanisme Memperoleh Hak Paten dan Perlindungan Hukum terhadap Paten**

### **1. Mekanisme memperoleh Hak Paten**

Subyek hukum yang berhak atas Paten berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
2. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 1, kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan. Seperti halnya kajian tentang doktrin *shops right*, maka Pasal 12 Undang-Undang Paten 2016 pun menganut bahwa pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Perlu digarisbawahi bahwa mulai sekarang jelas dan tegas, inventor tersebut berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud.

---

<sup>22</sup> Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Imbalan dimaksud dapat dibayarkan berdasarkan:

- a. jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. persentase;
- c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
- d. bentuk lain yang disepakati para pihak.<sup>23</sup>

Demikian pula ditegaskan melalui Pasal 13 Undang-Undang Paten tentang siapa yang berhak atas Paten dalam hubungan kedinasan dan invensi imbalan kepada inventor terkait invensinya setelah invensi tersebut dikomersialisasikan, sebagai berikut:

1. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain.
2. Setelah Paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
3. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
4. Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat 3, selain Pemegang Paten, inventor memperoleh royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan hak inventor untuk dapat dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.<sup>24</sup>

Terkait pemakai terdahulu, Pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang Paten masih relatif sama dengan Undang-Undang Lama (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011) hanya lebih diperjelas dan dipertegas, pihak yang melaksanakan Invensi

pada saat Invensi yang sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Pihak yang melaksanakan suatu Invensi dimaksud diakui sebagai pemakai terdahulu. Pihak yang melaksanakan suatu Invensi (terdahulu) hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika setelah diberikan Paten terhadap invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri.

Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya. Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas invensi yang sama tersebut. Mungkin perlu ditekankan bahwa pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan dan pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan Invensi.

Paten hanya diberikan berdasarkan permohonan, baik dengan menggunakan hak prioritas maupun tidak. Permohonan dengan Hak Prioritas diatur melalui Pasal 30 Undang-Undang Paten, bahwasanya permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal prioritas, harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan, harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama enam belas (16) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 juga diwadahi permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, yang diatur dalam Pasal 33, permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri. Terkait jangka waktu perlindungan Paten, masih sama dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yakni 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, yang berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2016 tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik. Pasal 23 menyebutkan perlindungan Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun

---

<sup>23</sup> Endang Purwaningsih, *Op-cit*, hal 31.

<sup>24</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

terhitung sejak tanggal Penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

Mengenai syarat dan tata cara permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 24, permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya, diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan, demikian pula permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun secara non elektronik.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 diatur apa saja yang harus ditulis dalam permohonan paling sedikit memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan harus dilampiri persyaratan:

- a. judul Invensi;
- b. deskripsi tentang Invensi;
- c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
- d. abstrak Invensi;
- e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
  - a) surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - b) surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
  - c) surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
  - d) surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Demikian pula, deskripsi tentang Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya, yang lebih penting lagi adalah Klaim harus mengungkapkan

secara jelas dan konsisten atas inti Invensi. Klaim jangan dibuat kabur/samar ataupun ambigu.<sup>25</sup>

Terkait pengumuman dan pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 46-53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa Menteri mengumumkan permohonan yang telah memenuhi ketentuan, dilakukan paling lambat tujuh hari setelah delapan belas bulan sejak Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dalam permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik, tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Menteri dan Pengumuman harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap orang. Pengumuman berlaku selama enam bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan, dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan kewarganegaraan inventor;
- b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. abstrak Invensi;
- d. tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- e. abstrak Invensi;
- f. klasifikasi Invensi;
- g. gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar;
- h. nomor pengumuman; dan
- i. nomor Permohonan.

Permohonan pemeriksaan substantif sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 diajukan secara tertulis paling lama tiga puluh enam bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan kepada Menteri dengan dikenai biaya dan jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali kepada Pemohon atau Kuasanya. Jika permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, namun jika permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

---

<sup>25</sup> Endang Purwaningsih, *Op-cit*, hal 35..

Permohonan pemeriksaan substantif terhadap divisional permohonan atau perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan divisional permohonan atau perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya. Jadi, jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan bersamaan dengan divisional permohonan atau perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya, divisional permohonan atau perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.

Pada Pasal 55 disebutkan:

1. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa;
2. Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan substantif.
3. Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
4. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa.
5. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri.

Jika permohonan Paten menggunakan hak prioritas, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:

- a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
- b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
- c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan Paten dimaksud ditolak;
- d. salinan sah keputusan penghapusan Paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri

dalam hal Paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau

- e. dokumen lain yang diperlukan.

Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu, jika bila ada orang yang ingin melakukan penelitian Paten sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.

Sistem pendaftaran Paten di Indonesia menganut *first to file* (siapa yang pertama kali mendaftarkan), berbeda dengan sistem pendaftaran Paten di Amerika, yakni *first to invent* (siapa yang pertama kali menemukan dan menyelesaikan penemuan).<sup>26</sup> Masyarakat umum perlu memperhatikan bahwa untuk mendapatkan perlindungan terhadap invensinya, harus dilakukan pendaftaran, yang jika lolos/berhasil maka akan dikeluarkan sertifikat Paten yang merupakan bukti hak atas Paten, yang didalamnya ditentukan lingkup perlindungannya berdasarkan invensi yang diuraikan dalam klaim. Demikian pula, perlu diingat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. bahwa perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

Paten itu sendiri yang bisa berupa produk maupun proses haruslah berwujud, sedangkan hak atas paten merupakan benda bergerak tidak berwujud. Sertifikat paten bisa dijadikan jaminan dalam bentuk fidusia untuk mengajukan kredit di lembaga keuangan.

Komisi Banding tetap ada dalam Undang-Undang Paten baru ini, yakni diatur dalam Pasal 64-70. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tugas dan peran Komisi Banding Paten yakni:

1. Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus;
  - a. permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
  - b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 37..

- c. permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten
- 2. Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1(satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. paling banyak 30 (tiga puluh) orang anggota yang berasal dari unsur:
    - 15 (lima belas) orang ahli di bidang Paten; dan
    - 15 (lima belas) orang Pemeriksa.
- 3. Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Paten.<sup>27</sup>

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit tiga orang dan paling banyak lima orang, yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua. Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari anggota Komisi Banding Paten yang salah satu anggotanya adalah Pemeriksa dengan jabatan paling rendah Pemeriksa Madya yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Dalam hal Majelis berjumlah lebih dari tiga orang, Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah lebih sedikit dari anggota Majelis selain Pemeriksa.

Permohonan Banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan; koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau keputusan pemberian Paten sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67. Pada Pasal 68, dinyatakan Permohonan banding diajukan secara tertulis, diajukan paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan

penolakan Permohonan serta alasan banding tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

Terkait permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten dinyatakan pada Pasal 69, 70 sebagai berikut:

1. Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.
2. Apabila Permohonan atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
3. Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan banding.
4. Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. pembatasan lingkup klaim;
  - b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
  - c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.
5. Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan.
6. Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
7. Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten maka Menteri akan menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.
8. Dalam hal Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

---

<sup>27</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016...

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama Sembilan bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten. Apabila permohonan terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten dalam waktu paling lama satu bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Dalam permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat. Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama sembilan bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan banding. Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat. Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, maka Menteri mencabut sertifikat. Terhadap putusan Komisi Banding Paten, Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Paten**

Salah satu hak kekayaan intelektual (HAKI) yang diatur dan dilindungi oleh hukum ialah Paten. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang lama. Diundangkannya undang-undang ini berlatar belakang pada pertimbangan bahwa undang-undang Paten yang lama, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional. Sejalan pula dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, dimana perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan undang-undang yang

dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi Inventor.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>28</sup> Sementara Invensi adalah suatu temuan, namun tidak sama artinya dengan menemukan suatu benda yang hilang. Invensi lebih luas dari itu. Invensi dalam hubungannya dengan Paten merupakan ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses terjadinya sebuah produk, atau penyempurnaan dan pengembangan dari sebuah produk,<sup>29</sup> sementara Inventor adalah penemunya.

Untuk melindungi kepentingan hukum atas Paten, Undang-Undang Paten tidak hanya mengatur tentang berbagai hal yang bersifat administratif dan privat belaka, melainkan juga memuat hukum pidana materil dan hukum pidana formil di bidang Paten. Hukum pidana formil hanya mengenai hal penyidikan saja,<sup>30</sup> khususnya dalam hal dilakukan oleh Pejabat Dirjen HAKI, penyidik selain dari penyidik anggota Kepolisian.

Ketentuan tentang hukum pidana materil Paten dirumuskan dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165. Diantara lima pasal yang memuat hukum pidana materil, ada 3 (tiga) pasal yang merumuskan tentang tindak pidana, ialah Pasal 161, 162 dan 163. Pasal 163 tidak merumuskan tindak pidana, melainkan ketentuan perihal alasan pemberatan pidana pada tindak pidana yang dirumuskan pasal sebelumnya. Pasal 165 juga tidak merumuskan tindak pidana Paten, melainkan tentang keterangan bahwa semua tindak pidana Paten merupakan tindak pidana aduan murni.

Ketentuan hukum pidana formil Paten dirumuskan dalam Pasal 159, mengatur tentang penyidikan khusus tindak pidana Paten. Sementara Pasal 160 sekedar merumuskan tentang perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 162 dan 162.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

<sup>30</sup> Bab XVII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Objek Paten adalah penemuan atau disebut invensi, *in casu* suatu ide inventor. Tidak semua Invensi dapat diberi hak Paten, melainkan Invensi yang memenuhi syarat, yaitu:

1. Ide itu harus dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik; dan
2. Temuan itu harus di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>31</sup>

Sementara subjek hukum Paten yang dilindungi hak Paten adalah orang yang menemukan ide (Inventor) tersebut, dan atau orang/pihak yang diberi persetujuan oleh Inventor untuk melaksanakan penemuan (Invensi) tersebut. Objek Paten yang dilindungi hukum ada 2 (dua) macam, ialah:

- Paten dan
- Paten sederhana.

Paten ada 2 (dua) macam, yaitu:

- Paten produk dan
- Paten proses

Objek Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah Inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.<sup>32</sup>

Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan (permohonan hak Paten), Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Maksud diungkapkan sebelumnya, ialah teknologi tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

- a. Tanggal Penerimaan (permohonan) atau
- b. Tanggal Prioritas.<sup>33</sup>

Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan

dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Jika Invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang secara massal dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.<sup>34</sup>

Subjek hukum Pemegang Paten pada dasarnya adalah Inventor sendiri, atau orang lain yang menerima dari Inventor. Apabila Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor.<sup>35</sup> Dalam hal Invensi dihasilkan dalam hubungan kerja, pihak yang berhak memperoleh Paten, adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Demikian juga dalam hal Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi. Inventor secara pribadi berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.<sup>36</sup>

Jika pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain. Setelah Paten dikomersilkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan Negara hukum pajak.<sup>37</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak dalam hal paten-produk dirumuskan dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa setiap orang tanpa persetujuan Pemegang paten dilarang membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual,

---

<sup>34</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 beserta Penjelasan.

<sup>35</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

<sup>36</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

<sup>37</sup> Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 .

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

<sup>32</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

<sup>33</sup> Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten dan dalam hal Paten proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana huruf a dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan Perlindungan hukum atas Paten dalam undang-undang tidak hanya bersifat administratif dan privat saja, melainkan juga memuat hukum pidana materiil dan hukum formil di bidang paten .

#### **B. Saran**

1. Hendaknya para penegak terutama Jaksa. Penuntut umum benar-benar memahami objek tindak pidana Paten dan dapat membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa produk yang diberi Paten yang dijual atau disewakannya adalah Paten produk terdaftar milik orang lain agar tidak salah dalam melakukan tuntutan.
2. Hendaknya para penemu atau Inventor atau orang lain yang menerima dari Inventor segera mendaftarkan temuannya untuk perlindungan hukum atas temuannya dari orang yang memanfaatkan penemuan tersebut demi kepentingan komersil dan pemerintah lebih mensosialisasikan cara/mekanisme pendaftaran paten demi memperoleh kepastian hukum serta melindungi terhadap subjek hukum paten yaitu Inventor atau pihak yang diberi persetujuan oleh Inventor untuk melaksanakan Invensi tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chazawi Adami, 2019, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta

- Nasution Rahmi JP, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Purwaningsih Endang, 2020, *Paten Dan Merek*, Setara Press, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2003, *Hukum Atas atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung.

#### **Undang-Undang:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten